Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) >> Skripsi STIK-PTIK

Kompetensi Penyidik Dalam Penerapan Spdp Online Pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (Studi Pada Satuan Reskrim Polres Belitung Timur)

Aditya Pandu Drajat Sejati

Deskripsi Lengkap: https://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=59219&lokasi=lokal

---

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu; menguraikan dan menganalisis kesiapan kompetensi penyidik dalam penerapan SPDP Online pada SPPT-TI; dan mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi Penyidik Satuan Reskrim Polres Belitung Timur dalam menerapkan SPDP Online dalam mewujudkan SPPT-TI.

Penelitian ini menggunakan teori dan konsep untuk menganalisis temuan penelitian seperti teori kompetensi, teori penegakan hukum, teori sistem peradilan pidana. Teori teknologi informasi, konsep penyidikan, konsep SPDP, dan konsep Ilmu Kepolisian. Selain itu, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ditemukan: (1) Implementasi SPDP online di Polres Belitung Timur masih terdapat kendala belum tersedianya tanda tangan elektronik untuk membubuhi surat SPDP. Sehingga kompetensi Penyidik Satreskrim Polres Belitung Timur sangat dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perubahan dan kendala tersebut; (2) Kesiapan kompetensi Penyidik Satuan Reskrim Polres Belitung Timur dalam penerapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Online dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) telah siap dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikap; (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi Penyidik Satuan Reskrim Polres Belitung Timur untuk menerapkan SPDP Online dalam mewujudkan SPPT-TI yaitu faktor struktur, substansi hukum, dan kultur/budaya.

Saran yang dapat diakukan yakni sebaiknya harus dipastikan bahwa penerapan SPDP Online sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan hukum.